

EFEKTIVITAS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MANDAILING NATAL

Indah Sri Wahyuli Lubis¹, Tunggul Sihombing²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: indahsriwahyuli12@gmail.com¹, tlumbantoruan@yahoo.co.id²

Abstract: *This study aims to see how effective Bappeda Mandailing Natal Regency is in preparing regional development plans in Mandailing Natal Regency. The data were then analyzed qualitatively using the theory of Quinn and Rorhbaugh. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. From the research results, it can be seen that the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Mandailing Natal Regency has been effective. This can be seen from the rational goals in the preparation of regional development planning in accordance with operational standards, effective human relations in development within the organization, where in the preparation of regional planning at Bappeda Mandailing Natal, subordinates and superiors always work together, work is also direct superior by superiors and subordinates. the head of the service, an open system that can be seen from community participation is directly involved in the preparation of regional development plans through the musrenbang, and the internal process model has been running effectively for the exchange of information and communication in the Bappeda of Mandailing Natal Regency.*

Keywords: *Effectiveness, Regional Development, Planning*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif Bappeda Kabupaten Mandailing Natal dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori Quinn dan Rorhbaugh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mandailing Natal sudah efektif. Hal ini terlihat dari tujuan yang rasional dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan standar operasional, hubungan manusia yang efektif dalam organisasi, dimana dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Mandailing Natal, bawahan dan atasan selalu bekerja sama, pekerjaan juga diawasi langsung oleh atasan dan kepala dinas, sistem terbuka terlihat dari partisipasi masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penyusunan rencana pembangunan daerah melalui musrenbang, dan model proses internal sudah berjalan efektif untuk pertukaran informasi dan komunikasi di Bappeda Kabupaten Mandailing Natal.

Kata kunci: Efektivitas, Pembangunan Daerah, Perencanaan

PENDAHULUAN

Muluk (2009:62) mengungkapkan bahwa otonomi daerah adalah hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pendapat

tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.

Adanya kemajuan di dalam pelaksanaan pembangunan daerah teramat

bergantung pada peran aktif dari pemerintah serta masyarakat. Baik pemerintah serta masyarakat harus bisa memberikan sinergi. Dengan tidak adanya keterlibatan masyarakat, pemerintah tidak akan bisa mendapatkan hasil pembangunan yang optimal. Pembangunan hanya akan memberikan produk baru yang kurang ada artinya bagi masyarakat, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Berlawanan dengan hal tersebut, dengan tidak adanya peran pemerintah yang optimal maka pembangunan akan berlangsung tidak teratur dan tanpa arah, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah baru yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi yang menurun tajam di masyarakat. Selain membutuhkan partisipasi masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar lebih hemat biaya dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini sangat penting karena akan menentukan apa peran pemerintah dan apa peran masyarakat, sehingga kedua belah pihak dapat berperan secara optimal dan sinergis.

BAPPED berperang sangat penting untuk membantu seorang pimpinan daerah dalam menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, mengembangkan daerah dan mengevaluasi pelaksanaannya. Ini adalah peran yang sangat penting dalam setiap rencana pembangunan daerah. Selain itu, tugas pokok dan fungsi Bappeda paska perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota khususnya pada tingkat lintas batas untuk mencapai keselarasan pembangunan daerah yang sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Pembangunan Daerah (RKPD) atau rencana pembangunan tahunan.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mandailing Natal didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan hasil kajian aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah rencana pembangunan yang disusun setiap tahun (Musrenbang). Dimulai dari musrenbang tingkat desa/kelurahan, kemudian dilanjut ke tingkat kecamatan dan terakhir tingkat kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan prioritas pembangunan dan kesepakatan antar pelaku pembangunan mengenai RKPD, dengan fokus pada sinkronisasi tujuan, arah kebijakan, program, dan tujuan kegiatan OPD serta kebutuhan nyata masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten Mandailing Natal masih banyak keluhan dari masyarakat tentang alokasi dana yang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan skala prioritas serta usulan yang disampaikan masyarakat seringkali tidak direalisasikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mandailing Natal. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Mandailing Natal.

METODE

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Menurut Mayer dan Greenwood (dalam Silalahi, 2009:27), deskripsi kualitatif secara sederhana adalah pengidentifikasian ciri-ciri atau karakteristik yang khas dari sekelompok orang, objek, atau peristiwa.

Lokasi penelitian terletak di Bappeda Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian dalam menetapkan informan penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik mengidentifikasi sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan teknik purposive sampling ini adalah untuk memilih informan yang benar-benar mengetahui informasi tersebut dan dapat menjadi sumber data yang tepat. Peneliti juga menggunakan teknik snowball sampling. Menurut Nurdiani (dalam Fitrah dan Luthfiah 2017:162), snowball sampling adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dari suatu jaringan atau rangkaian hubungan yang berkesinambungan. Dengan teknik ini peneliti mendapatkan informasi dari informan yang satu ke informan yang lain, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan teliti. Ini memberi peneliti lebih banyak dan lebih banyak informasi yang mereka butuhkan untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan teknik analisis data di atas akan memudahkan penulis untuk menganalisis data yang sistematis sehingga hasil penelitian ini akan dideskripsikan dengan jelas. Kemudian teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan bentuk triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan untuk membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan membandingkan hasil wawancara dengan literatur yang ada.

Peneliti juga menggunakan triangulasi metode yang melibatkan penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data terkait dengan pendekatan yang diusulkan oleh Quinn dan Rorhbaugh (dalam Azhar Kasim 1993:9) dengan kategori Tujuan yang Rasional, Hubungan Manusia dalam Organisasi, Model Sistem Terbuka dan Model Proses Internal (Informasi dan Komunikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan yang Rasional

Dalam efektifitas organisasi guna mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan aturan, prosedur dan aparatur administrasi, dengan memperhatikan keahlian (expertise) setiap orang untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan proses, pekerjaan, dalam lingkup kewenangan dan dengan keduanya. tanggung jawab fungsional dan struktural. Dengan menekankan aspek rasionalitas dalam mencapai tujuan, model ini menekankan pada rumusan tujuan, menggambarkan kegiatan. Organisasi publik membutuhkan aturan atau dasar politik untuk memandu kegiatan mereka dan membentuk dasar pengambilan keputusan mereka. Berdasarkan kebijakan tersebut, organisasi dapat menilai apakah kegiatannya telah dilaksanakan tanpa menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Syarifuddin Lubis, S.AP Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan yang mengatakan bahwa: *“Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pasti ada SOP nya, karna tanpa SOP semha pekerjaan yang dikerjakan itu tidak akan terarah.*

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda Mandailing Natal mempunyai fasilitas pendukung kinerja yang tersedia dalam hal menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Dalam hal tersebut agar fasilitas yang tersedia dapat dijalankan dengan baik agar tercapainya tujuan kinerja yang efektif dan efisien.

Dinyatakan oleh Bapak Akhmad Rizal, SH.I Analisis Data dan Informasi: “*Untuk menjaga dan mendukung kelancaran tugas dan fungsinya terdapat sarana prasarana pendukung yang digunakan berupa ruang kerja, komputer, monitor LCD, Hand-held camcorder, kamera digital, server dan lain-lain.*”



Gambar. Ruang Kerja Pegawai Bappeda Mandailing Natal

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Gambar di atas merupakan ruang kerja pegawai Bappeda Mandailing Natal yang dilengkapi dengan fasilitas berupa komputer, printer, infocus, lemari dan lainnya. Sarana dan prasarana untuk pegawai di Bappeda Kabupaten Mandailing Natal. Peneliti melihat secara langsung bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sudah mempunyai SOP dan pegawai Bappeda sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen peneliti di atas, dapat dikatakan bahwa efektivitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal terkait dengan model tujuan yang rasional yang menekankan pada perumusan tujuan dan standar kebijakan, dan landasan kebijakan yang diatur secara jelas dalam undang-undang dan dilaksanakan sesuai dengan SOP. Untuk mencapai tujuan sarana dan prasarana tersebut, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Kabupaten Mandailing Natal sudah memadai. Untuk itu model tujuan rasional dapat dianggap efektif dalam mencapai tujuan Bappeda Kabupaten Mandailing Natal.

Model Hubungan Manusia

selain organisasi yang efektif organisasi yang sangat ditentukan oleh sistem hubungan manusia. Untuk alasan ini, model hubungan manusia menjadi referensi di lembaga pemerintah jika kegiatan layanan diberikan kepada masyarakat secara efektif. Hubungan yang baik antara karyawan di satu area dengan daerah lain harus mencapai tujuan terorganisir secara efektif. Bapak Syarifuddin Lubis, S.AP Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mengatakan bahwa: “*Kita bekerjasama dengan baik, misalnya ada kerjasama antar bidang. Kita memiliki grup Whatsapp yang misalnya kalau kita ada masalah biasanya bisa langsung koordinasi lewat grup WhatsApp atau terkait langsung ke pekerjaan dan ini sudah ditentukan dalam tupoksi masing-masing.*”

Kerjasama antar seluruh staf di Bappeda Kabupaten Mandailing Natal tidak dapat dipisahkan. Dapat ditunjukkan bahwa kerja Bappeda Mandailing Natal sejalan dengan standar kinerja pelayanan dimana dalam menyusun rencana pembangunan daerah, pegawai berkoordinasi antar bidang, sehingga kekompakan antar bidang dan antar departemen berjalan dengan optimal. Selain itu, di setiap bidang terdapat grup chat WhatsApp yang dapat mengkonfirmasi masalah terkait pekerjaan dan dapat dikoordinasikan secara langsung.

Bapak Wira Okriadi Lubis, SP, M.Si Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mengungkapkan: “*Komunikasi antara pimpinan dan bawahan berjalan dengan sangat baik. Dalam mempersiapkan rencana pembangunan daerah, kita harus bekerja saling berkoordinasi, sehingga komunikasi dan koordinasi kita di Bappeda harus tepat, berjalan dengan baik.*”



Gambar. Koordinasi antara bawahan dan atasan di kantor Bappeda Kabupaten Mandailing Natal

Sumber: *Dokumentasi Peneliti 2021*

Daat dilihat pada gambar di atas, bawahan dan atasan saling berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Peneliti melihat hubungan antara pimpinan dan bawahan di Bappeda Mandailing Natal terjalin dengan baik, adanya komunikasi dan koordinasi antara sesama pegawai maupun antara atasan dan bawahan. Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah diawasi langsung kepala bidang.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal terkait Model hubungan manusia dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sudah efektif. Daya tanggap pegawai Bappeda Mandailing Natal dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Bappeda Mandailing Natal sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerjasama di antara seluruh staf di lingkungan Bappeda Kabupaten Mandailing Natal. Hal itu dapat dibuktikan bahwa pekerjaan Bappeda Mandailing Natal telah sesuai dengan standar operasional pelayanan dimana dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pegawai saling berkoordinasi antar bidang, kerjasama antar bidang dan antar seksi petugas berjalan dengan baik.

Model Sistem Terbuka

Model sistem ini mengasumsikan

bahwa sebuah organisasi, baik publik maupun swasta tidak dapat lepas dari lingkungan. Bahkan sebuah organisasi dikatakan efektif jika sangat fleksibel, mudah beradaptasi, dan siap untuk mengatasi struktur lingkungan yang selalu berubah-ubah. Pemakaian model sistem ini menekankan pentingnya interaksi organisasi dengan lingkungan karena suatu organisasi hanya dapat dikatakan mencapai efektivitas keseluruhan jika mampu beradaptasi dengan lingkungannya, baik di dalam maupun diluar. Kemampuan beradaptasi ini akan mempengaruhi seberapa optimal tujuan organisasi tercapai. Di ungkapkan oleh Bapak Syarifuddin Lubis, S.AP Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Mandailing Natal: *“Proses penyusunannya dimulai dari musrenbang di tingkat desa, di mana mereka memprioritaskan pembangunan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian di tingkat kabupaten, di mana proposal program pembangunan desa/kel ditelaah dan diprioritaskan, kemudian dilanjutkan di tingkat kabupaten, sebelum implementasi di tingkat kabupaten sangat diperlukan. adanya forum OPD, yaitu usulan subbagian diselaraskan dengan agenda kerja pembangunan yang ditetapkan oleh OPD.”*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat, Bapak Amri Lubis: *“Usulan masyarakat masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat atau masih mencerminkan rencana hanya dalam bentuk yang diinginkan oleh beberapa pihak saja, masih banyak proyek yang belum sepenuhnya diakui masyarakat.”*

Informan Masyarakat lain mengungkapkan, Ibu Diana Sari: *“Usulan masyarakat seringkali tidak bisa direalisasikan sedangkan pembangunan di Mandailing Natal banyak yang gak terlalu penting seperti pembangunan tempat wisata yang terlalu banyak yang ujung-ujungnya rusak dan tidak layak untuk dikunjungi.”*

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan melalui forum Musrenbang cukup besar namun usulan masyarakat sering tidak bisa diakomodir dan dilaksanakan di lapangan. Hal ini membuat masyarakat bersikap acuh terhadap proses penyusunan rencana pembangunan ke masa berikutnya, masyarakat juga menganggap bahwa keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah hanya sebatas formalitas.



Gambar . Musrenbang Tingkat Desa

Sumber: *Dokumntasi Peneliti, 2021*

Dari gambar di atas dapat dilihat hanya beberapa masyarakat yang menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan daerah, padahal partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sangatlah dibutuhkan. Sedikitnya masyarakat mengikuti musrebang peneliti melihat dari sikap dan pandangan masyarakat Mandailing Natal terlihat bersikap pesimis, tidak percaya terhadap musrenbang dan masyarakat menganggap bahwa musrenbang tidak perlu dilakukan. Selanjutnya hasil observasi, peneliti melihat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan daerah presentase kehadiran masyarakat masih rendah dikarenakan pelaksanaan program yang diusulkan sangat berbeda dengan masyarakat di musrenbang, pada akhirnya masyarakat malas dan lebih memilih untuk mencari uang untuk keluarga daripada terlibat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diketahui bahwa efektivitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda Kabupaten Mandailing Natal dikaitkan

dengan model sistem terbuka dikatakan belum efektif. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang tidak berjalan dengan baik karena data yang dibutuhkan untuk musrenbang tidak murni berasal dari usulan masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat tidak mempercayai pentingnya data yang disarankan dalam pelaksanaan musrenbang, masyarakat pada akhirnya lebih memilih mencari uang untuk keluarga daripada mengikuti musrenbang.

Model Proses Internal

Model proses internal mengasumsikan bahwa dalam suatu organisasi terdapat dua faktor penentu utama tercapainya tujuan, yaitu informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, model proses internal menempatkan manajemen informasi, komunikasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, dan pemantauan kinerja tugas sebagai kegiatan sentral dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajemen informasi yang lebih baik, mulai dari pengumpulan data, pemrosesan data, pemutakhiran data (updating), penyimpanan, pengambilan dan penggunaan data, serta komunikasinya dengan pemangku kepentingan misi internal dan eksternal lainnya, semakin baik organisasi akan mencapai tujuan tertentu, baik di formal (kelembagaan) dan operasional. Secara umum, ada tiga model komunikasi formal dalam suatu organisasi, yaitu komunikasi top-down, komunikasi bottom-up, dan komunikasi *side to side*. Semakin baik pengelolaan informasi dan komunikasi dalam suatu organisasi publik, semakin efektif pula pelayanan yang diberikan.

Diungkapkan oleh Bapak Wira Okriadi Lubis, SP,M.Si Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi: *“Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan sekali setahun, diakhir tahun selalu ada kegiatan perencanaan untuk di tahun berikutnya jadi saat tahun ini berjalan kita merencanakan untuk tahun berikutnya, misalkan Desember 2020 kita sudah mulai menyusun*

rancangan untuk tahun 2021, ada tahapantahapan, penjadwalannya, dan SOP yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2017.”

Perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan secara berkala setahun sekali melalui beberapa tahapan, tahap pertama penyusunan rancangan awal yang dilakukan oleh Bappeda. Dilanjutkan dengan pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan, berbagai usulan yang muncul dalam Musrenbang diurutkan berdasarkan skala prioritas berdasarkan seberapa urgensi masyarakat membutuhkannya, kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Setelah melewati Musrenbang Kecamatan, dilanjutkan dengan pembahasan Forum SKPD. Kemudian dilanjutkan ke tingkat bupati yaitu penyusunan naskah RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan naskah final RKPD, dan kemudian identifikasi RKPD.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat, yaitu Ibu Diana Sari: *“Kita biasanya melakukan musrenbang desa di awal januari, setau saya emang sudah ada penjadwalannya dari Kabupaten.”*

Dari pernyataan informan di atas dapat dinyatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah untuk informasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam hal penjadwalan telah sampai desa. Setiap desa mengumpulkan semua usulan-usulan masyarakat dan memilah mana yang paling penting karena usulan masyarakat desa terbatas, setelah melakukan musrenbang tingkat desa akan dilanjut ke tingkat kecamatan dan memilah-milah kembali usulan masyarakat yang masuk, lalu ketingkat kabupaten. Berdasarkan hasil observasi penulis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sudah sesuai dengan yang dijadwalkan. Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimulai dari Musrenbang. Musrenbang dimulai di tingkat desa/kelurahan. Berbagai usulan yang muncul dalam

Musrenbang diurutkan berdasarkan skala prioritas berdasarkan seberapa urgensi masyarakat membutuhkannya. Kemudian dilanjut ketingkat kecamatan. Setelah melalui Musrenbang Kecamatan, dilanjutkan dengan musyawarah Forum SKPD. Kemudian dilanjut ke tingkat Kabupaten yang merupakan Penyusunan Rancangan RKPD, lalu Perumusan Rancangan Akhir RKPD, kemudian Penetapan RKPD.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mandailing Natal terkait dengan model proses internal dalam pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi sudah efektif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah oleh Bappeda Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan Standar Kinerja Pelayanan dimana Bappeda Kabupaten Mandailing berkoordinasi berkoordinasi dengan Desa dalam hal penjadwalan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

SIMPULAN

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerjasama di antara seluruh staf di lingkungan Bappeda Kabupaten Mandailing Natal. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan bahwa pekerjaan Bappeda Mandailing Natal telah sesuai dengan standar operasional pelayanan dimana dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pegawai saling berkoordinasi antar bidang, kerjasama antar bidang dan antar seksi petugas berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Kabupaten Mandailing Natal juga sudah memadai.

Partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan musrenbang belum berjalan dengan baik karena data yang dibutuhkan untuk musrenbang tidak murni berasal

dari usulan masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat tidak mempercayai pentingnya data yang disarankan dalam pelaksanaan musrenbang, masyarakat pada akhirnya lebih memilih mencari uang untuk keluarga daripada mengikuti musrenbang. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bappeda oleh Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan standar operasional pelayanan dimana Bappeda Kabupaten Mandailing berkoordinasi berkoordinasi dengan Desa dalam hal penjadwalan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Firdaus dan Fakhry Zamzam. 2018. Aplikasi Metodologi Penelitian. Yogyakarta:

Deepublish.

Fitrah, Muh dan Luthfiah. 2017.

Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Jawa Barat: CV. Jejak.

Kasim, Azhar.1993. Pengukuran Efektivitas

Dalam Organisasi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Muluk, Khairul. 2009. Desentralisasi Pemerintah dan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.